

**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL
DILIHAT DARI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DAERAH
(Studi Kasus di Kabupaten Klaten)**

Hadi Sasana

Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang

Abstract

Realization of a more realistic regional autonomy that can offer tangible economic, social and political benefits to the region in particular. This research attempts to identify the influence of regional economic sectors on the Administrative Independency Ratio (Derajat Kemandirian Fiskal), in Klaten Regency. This analysis use the Partial Adjustment Model (PAM). The data used in this research are time series data for the period 1978 until 2003.

The results of this research indicated that the dominant contribution for Administration Independency Ratio is coming from the agricultural sector of which the coefficient regression is 0.926 for short-term period and 1.052 for long-term period.

Keywords: *Administrative independency ratio, partial adjustment model, regional autonomy.*

PENDAHULUAN

Tuntutan dilaksanakan otonomi daerah dengan titik berat pada pemerintah kabupaten/kota sudah bergulir, persoalan yang muncul adalah seberapa jauh pemerintah daerah mampu membangun aspek-aspek dasar yang menjadi tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam menggalang kemampuan keuangan daerah. Namun proses transisi otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal di Indonesia menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan karena terjadi seiring dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi pada medio 1997 dan dampaknya hingga saat ini masih terasa.

Ketergantungan fiskal yang tinggi oleh pemerintah daerah menunjukkan betapa kuatnya peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dibandingkan kemampuan pemerintah daerah. Angka ini dapat dilihat dari porsi bantuan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Menyimak hal tersebut pada Tabel 1 disajikan distribusi realisasi penerimaan daerah Kabupaten/Kota se Indonesia.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/ Kota se Indonesia (dalam persen)

Jenis Penerimaan	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
Sisa Anggaran Tahun Lalu	2,97	2,40	3,79	3,85
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13,25	11,42	9,88	8,66
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15,19	13,12	11,88	10,83
Sumbangan dan Bantuan	67,70	71,88	74,09	76,25
Pinjaman Daerah	0,89	1,01	0,37	0,41
Total Penerimaan	100	100	100	100

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tk. II beberapa terbitan.

Dari tabel 1 terlihat bahwa porsi sumbangan dan bantuan dibandingkan dengan yang lain paling tinggi, yakni rata-rata sebesar 72,48 persen. Disisi lain kontribusi PAD dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah, menunjukkan begitu rendahnya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam memenuhi kebutuhan dibandingkan dengan kemampuannya (dibawah 14 persen). Dengan demikian realitas hubungan keuangan pusat dan daerah ditandai masih besarnya peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dibanding pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan daerah sendiri.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah otonom terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana perimbangan, 3) Pinjaman daerah, 4) Lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai pelaksana pembangunan di daerah yang berdasar atas asas desentralisasi, pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri. Realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten (dalam ribuan Rp.)

No	Penerimaan	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Sisa anggaran tahun lalu	2.044.372	3.432.786	3.648.660	5.333.308	11.275.557
2.	Pendapatan Asli Daerah	7.469.953	7.901.972	6.598.582	13.758.837	17.436.941
3.	Dana Perimbangan	5.825.771	129.634.397	114.931.035	298.096.332	338.775.335
4.	Penerimaan Lainnya	12.484.079	959.548	1.400.752	14.300.896	9.811.831
5.	Pinjaman Pemda	-	-	-	-	-
6.	Jumlah Penerimaan	27.824.175	140.969.155	126.579.029	351.121.862	351.121.863

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Jateng Tahun 1998 s/d Tahun 2002.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa sumber keuangan daerah Kabupaten Klaten sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintah pusat dan hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. Hal ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Penerimaan APBD tahun anggaran 1999 dari PAD sebesar Rp.7.469.953.000 (0,27% dari total penerimaan daerah), sedangkan untuk tahun anggaran 2002 sebesar 4.10 persen, hal ini menunjukkan besarnya ketergantungan fiskal Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten memiliki tingkat kemandirian keuangan yang paling rendah di Propinsi Jawa Tengah (tahun 2002), sedangkan Kota Semarang berada pada urutan pertama. Hal inilah yang dijadikan alasan mengapa Kabupaten Klaten menjadi pilihan untuk dilakukan penelitian.

Pemerintah daerah harus berupaya mencari dan menggali potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. Apalagi dalam era otonomi saat ini, kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi sangat diharapkan guna mendukung terciptanya *good governance*. Bertitik tolak dari uraian pendahuluan di atas, akan dilakukan suatu studi guna menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian fiskal dilihat dari sektor-sektor ekonomi daerah di Kabupaten Klaten. Masalah penelitian ini dibatasi pada pertanyaan : seberapa besar pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah memberikan kontribusi terhadap tingkat kemandirian fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk : (a) Menganalisis tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Klaten sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diukur dari besaran Derajat Kemandirian Fiskal (DKF). (b) Menganalisis kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB terhadap tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Klaten.

LANDASAN TEORI

a. Otonomi dan Desentralisasi

Otonomi daerah menurut UU. No. 32 Tahun 2004, adalah hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan agar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah adalah sistem desentralisasi.

Menurut UU. No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam-macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi dan lain sebagainya.

Menurut Dennis Rondinelli dkk. (1988), keberhasilan kebijakan desentralisasi di negara sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi dan budaya seperti :

- 1). Sampai seberapa jauh pimpinan politik pusat dan birokrasi mendukung desentralisasi dan organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab.
- 2). Sampai seberapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang ada mendorong terciptanya desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan.
- 3). Kebijakan dan program yang dirancang dengan memadai untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan.
- 4). Sampai seberapa jauh tersedia sumber daya keuangan, manusia dan prasarana fisik yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab

Keempat faktor tersebut memiliki derajat kepentingan yang sama dan dalam banyak hal sangat relevan dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia. Atas desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan semakin beratnya beban pusat untuk mengatasi sendiri tantangan pembangunan yang semakin kompleks, timbul kesadaran baru bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus lebih demokratis, mendorong partisipasi, kemajuan dan kemandirian daerah.

b. Desentralisasi Fiskal Daerah.

Desentralisasi Fiskal Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal dengan berbagai proxy (Abdul Halim, 1999) sebagai berikut :

$$(1). \quad \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

$$(2). \quad \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

$$(3). \quad \frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Dimana : $TPD = PAD + BHPBP + SB$

Kalau hasilnya tinggi, derajat desentralisasinya besar (mandiri).

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999), disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- 1). Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan

hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.

- 2). Memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Menurut Kenneth Davey (1988) hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluaran-pengeluarannya adalah tidak langsung. Utamanya bagi otonomi daerah adalah mempunyai sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung pada asal dana tersebut dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana bagi kepentingan masyarakat daerah di dalam batas-batas yang ditentukan perundang-undangan. Alokasi dana dari pemerintah pusat yang disertai kontrol yang ketat dalam penggunaannya tidak akan mendorong daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, tetapi justru dapat mematikan inisiatif daerah yang bersangkutan. Selain itu akan membuat daerah menjadi makin tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.

Dari hal tersebut di atas kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya.

Kemudian untuk mengukur seberapa besar tingkat kemandirian fiskal suatu daerah digunakan ukuran apa yang dinamakan *Administrative Independency Ratio* (AIR) atau bisa juga disebut Derajat Kemandirian/ Otonomi Fiskal (DKF/ DOF) yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD pada tahun yang sama, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat (Elia Radianto, 1997).

c. Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan

ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab (Elia Radianto, 1997).

Menurut UU Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 5 disebutkan bahwa sumber-sumber keuangan pemerintah daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan yang merupakan hak pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkusubroto, 1993).

Pada dasarnya pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan regulator. Sebagai fungsi budgetair, pajak merupakan alat untuk mengumpulkan dana melalui kas negara bagi pembangunan. Pemerintah sangat mengharapkan penerimaan pajak selalu meningkat karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Pada fungsi regulator, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Artinya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjalankan peranannya. Peranan pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen mencapai tujuan masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain, sebagai berikut :

1. PDRB per kapita

Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, termasuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan, dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2. Inflasi

Inflasi biasanya akan mendorong tingkat harga atau nilai sewa properti. Dalam teori, nilai sewa properti erat kaitannya dengan pendapatan seorang pemilik tanah dan oleh sebab itu wajar dan dapat dipahami untuk dijadikan dasar bagi perpajakan.

3. Jumlah wajib pajak

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional.

d. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Menurut Chenery (dalam Elia Radianto, 1997) pembangunan ekonomi diartikan sebagai seperangkat perubahan yang saling berkaitan di dalam struktur suatu perekonomian yang diperlukan bagi terciptanya pertumbuhan yang terus menerus. Disisi lain menurut Todaro (1977), disebutkan bahwa pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan dalam pertumbuhan GNP per kapita sebagai indeks dari pembangunan. Akan tetapi pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur, perlu diusahakan adanya keserasian dan keselarasan dalam pemakaian sumber daya alam, sumber daya manusia serta permodalan dan teknologi dalam pelaksanaan proses pembangunan.

HIPOTESIS

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian sebelumnya hipotesis yang akan diuji dalam studi ini adalah : pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap DKF Kabupaten Klaten

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten, dengan menggunakan data sekunder (*time series*) selama kurun waktu tahun 1978 - 2003. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif dan kuantitatif model *Partial Adjustment Model* (PAM).

a. Analisis Diskriptif.

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Klaten terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

b. Model Partial Adjusment Model (PAM)

Dalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan model PAM untuk mengetahui pengaruh variabel sektor Pertanian; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Industri; sektor Listrik, Gas dan Air; sektor Bangunan;

sektor Perdagangan, Hotel, Restoran; sektor Angkutan dan Komunikasi; sektor Jasa; dan sektor Bank terhadap variabel dependen Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) Kabupaten Klaten dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan kerangka pemikiran teori yang disebutkan diatas, maka model riset dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = f (X1_t .X2_tXn)(1)$$

$$Y_t = b_0 + b_1X1_t + b_2X2_t + b_3X3_t + b_4X4_t + b_5X5_t + b_6X6_t + b_7X7_t + b_8X8_t + b_9X9_t + b_{10}Y_{t-1} + e(2)$$

Keterangan :

- Y_t = Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) Kabupaten Klaten tahun t (rasio PAD terhadap total penerimaan APBD)
- $X1_t$ = Pertumbuhan sektor Pertanian (Tan) tahun t
- $X2_t$ = Pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian (PtPgl) tahun t
- $X3_t$ = Pertumbuhan sektor Industri (Indt) tahun t
- $X4_t$ = Pertumbuhan sektor Listrik, Gas dan Air (LGA) tahun t
- $X5_t$ = Pertumbuhan sektor Bangunan (Bgn) tahun t
- $X6_t$ = Pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel, Restoran (PHR) tahun t
- $X7_t$ = Pertumbuhan sektor Angkutan dan Komunikasi (AktKm) tahun t
- $X8_t$ = Pertumbuhan sektor Jasa tahun t
- $X9_t$ = Pertumbuhan sektor Bank tahun t
- Y_{t-1} = Derajat Kemandirian Fiskal tahun sebelumnya
- b_0 = Konstanta / intercep
- b_1, b_2, \dots, b_9 = Koefisien regresi.
- e = *Disturbance error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum dan Perekonomian

Kabupaten Klaten terletak antara garis 7 ° 30' - 7 ° 45' Lintang Selatan dan garis 110 ° 30' - 110 ° 45' Bujur Timur. Terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa swasembada. Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2003 sebesar 1.277.297 jiwa, berarti mengalami kenaikan 0,45% dari tahun 2002.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten penyangga beras terbesar di Propinsi Jawa Tengah. Produksi padi per hektar yang dihasilkan pada tahun 2003 sebesar 54,37Kw/Ha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2002, produksi per hektarnya mengalami penurunan 1,9%. Hal ini akibat serangan hama sehingga terjadi puso yang cukup banyak serta penurunan areal lahan persawahan.

Peran daerah dalam mendukung perekonomian sangatlah penting, mengingat pada era otonomi daerah saat ini dituntut adanya peran aktif dari para eksekutif untuk lebih banyak lagi menggali potensi daerahnya serta memainkan peran yang lebih besar dalam merangsang aktifitas ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi disamping bisa berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita yang pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi ekonomi yang ada semakin besar PDRB dan PAD nya. Data selengkapnya PDRB Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Tahun 2001-2003 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003
Pertanian	230.692,35	224.195,36	234.554,40
Pertambangan dan penggalian	6.384,05	7.375,13	8.355,88
Industri	291.559,62	307.821,56	314.029,51
Listrik, gas, air	11.672,16	14.784,59	15.995,89
Bangunan	105.575,37	116.772,37	126.715,47
Perdagangan, hotel, restoran	33.693,01	350.798,00	363.418,36
Angkutan dan komunikasi	48.090,13	50.005,38	52.736,59
Bank dan lembaga keuangan	64.550,37	65.757,63	70.054,23
Jasa	152.291,69	153.456,94	157.196,91
PDRB	1.247.746,75	1.290.967,26	1.343.057,24

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, tahun 2004

Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katen untuk mengumpulkan dana dalam upaya mendanai pengeluaran yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Pertama, dapat diperoleh dari sumber - sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, dari bagi hasil pajak/non pajak. Ketiga adalah dari sumbangan dan bantuan. Keempat dari penerimaan pembangunan yang berasal dari pinjaman dan digunakan untuk belanja pembangunan.

Pada tahun 2003 realisasi penerimaan daerah Kabupaten Klaten sebesar Rp 536.558.035.724 atau mengalami kenaikan 26,31% dari tahun sebelumnya, dengan penerimaan terbesar diperoleh dari dana perimbangan sebesar 81,51% dari total penerimaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2001-2003

Uraian	2001	2002	2003
Penerimaan daerah	351.121.862.834	407.282.401.984	536.558.035.724
Pengeluaran rutin	321.369.325.307	354.501.066.977	483.855.113.000
Pengeluaran pemb.	27.542.983.392	46.809.359.245	111.533.537.000
PAD	13.758.837.7543	17.436.941.399	22.288.967.164

Sumber : Bagian Keuangan Daerah Kab. Klaten, tahun 2003

b. Analisa Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten

Kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilihat dari besarnya rasio PAD terhadap APBD daerah yang bersangkutan, semakin besar PAD-nya semakin kuat pula tingkat kemandirian fiskalnya. Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten
Tahun 1978-2003

Tahun	PAD	APBD	DKF (%)
1978	461.514.000	1.934.042.000	23.86
1979	464.744.000	2.725.350.000	17.05
1980	467.974.000	3.516.658.000	13.31
1981	638.724.000	3.844.650.000	16.61
1982	697.673.000	4.283.185.000	16.29
1983	741.528.000	4.630.144.000	16.02
1984	857.597.000	5.123.466.000	16.74
1985	1.028.634.000	5.984.396.000	17.19
1986	1.373.193.000	6.539.419.000	21.00
1987	1.650.378.000	6.945.679.000	23.76
1988	2.208.408.000	10.777.221.000	20.49
1989	2.433.965.000	12.278.070.000	19.82
1990	2.898.773.000	16.445.894.000	17.63
1991	3.467.695.000	19.390.091.000	17.88
1992	4.161.488.000	24.182.761.000	17.21
1993	4.724.784.000	28.436.162.000	16.62
1994	5.665.545.000	32.910.531.000	17.21
1995	6.060.622.000	35.143.003.000	17.25
1996	6.209.152.000	39.392.407.000	15.76
1997	6.941.367.000	57.905.426.000	11.99
1998	7.469.953.000	27.824.175.000	26.85
1999	7.901.972.000	140.969.155.000	5.61
2000	6.598.582.000	126.579.029.000	5.21
2001	13.758.837.000	351.121.862.000	3.91
2002	17.436.941.000	407.282.401.000	4.28
2003	22.288.967.000	536.558.035.000	4.15

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2004

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 /1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemampuan finansial Pemerintah Kabupaten Klaten dilihat dari tingkat kemandirian fiskalnya cukup tinggi (DKF di atas 15% pertahun). Setelah pelaksanaan otonomi daerah DKF Kabupaten Klaten justru mengalami penurunan sangat serius (tahun 2001-2003 rata-rata 4,13% per tahun). Dilihat dari potensi ekonomi daerah, potensi andalan daerah ini adalah dari sektor pertanian. Sementara nilai output dari sektor pertanian sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai output industri manufaktur. Potensi pajak maupun retribusi dari sektor ini masih relatif kecil, karena belum berkembangnya agroindustri yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian. Penjualan hasil-hasil pertanian masih bersifat barang mentah dengan nilai tambah yang relatif rendah. Disisi lain luas lahan pertanian dari tahun ke tahun semakin berkurang karena makin banyaknya kebutuhan lahan untuk pemukiman serta industri. Sementara itu sektor industri yang berkembang di daerah Kabupaten Klaten belum mampu menyerap output dari sektor pertanian, dan cenderung mendatangkan input dari luar daerah bahkan impor dari luar negeri. Sektor-sektor yang lain belum bisa memberikan kontribusi lebih terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa penggalan potensi daerah sebagai sumber penerimaan belum optimal.

Sebaliknya sumbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan yang cukup besar. Penerimaan yang relatif besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya belum mampu menimbulkan *multiplier effect* di sektor riil karena sebagian besar anggaran dialokasikan pada pengeluaran rutin. Pada masa otonomi daerah ini Kabupaten Klaten menerima limpahan pegawai dari pusat cukup banyak sehingga relatif membebani anggaran daerah.

c. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi DKF Dilihat dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah dengan Model PAM

Hasil estimasi regresi berganda dengan model PAM dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Hasil Estimasi Regresi Berganda Model PAM

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,448	2,960		2,854	.013
	X1	.926	.467	2,002	2,982	.022
	X2	-.033	.040	-.191	-.819	.427
	X3	.493	.647	3,064	2,308	.037
	X4	.018	.288	.063	.062	.952
	X5	.349	.231	.214	1,510	.091
	X6	.425	.159	.499	2,673	.031
	X7	.379	.189	.230	1,074	.071
	X8	.315	.131	.052	2,403	.032
	X9	.583	.111	1,838	2,903	.028
	Yt-1	.120	.059	.122	2,045	.042

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2005

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model linear dinamis PAM di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam jangka pendek, tidak semua variabel (sektor-sektor/lapangan usaha dalam PDRB) mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap DKF Kabupaten Klaten.

Variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten adalah sektor pertanian (nilai koefisien sebesar 0.926). Hal ini bisa dimaklumi karena dilihat dari letak geografisnya sebagian besar wilayah di Kabupaten Klaten merupakan tanah persawahan, apalagi didukung dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya yang cenderung masih bergantung pada sektor ini. Tidak mengherankan apabila sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan di daerah ini. Kabupaten Klaten merupakan produsen padi terbesar di Jawa Tengah dan merupakan lumbung beras nasional.

Sementara itu, sektor yang mempunyai pengaruh paling kecil terhadap DKF Kabupaten Klaten yaitu sektor jasa. *Share* sektor jasa terhadap PDRB relatif kecil, dan sektor jasa di daerah ini belum berkembang secara optimal. Pada tahun-tahun mendatang dimana era perdagangan bebas semakin masuk ke daerah, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor jasa di Kabupaten Klaten. Sedangkan beberapa sektor yang tidak berpengaruh terhadap DKF Kabupaten Klaten adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor Listrik, gas dan air; sektor bangunan; sektor angkutan dan komunikasi.

Dari hasil estimasi dapat dijelaskan bahwa, dalam jangka pendek pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1% akan meningkatkan Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten meningkat sebesar 0.926%. Pertumbuhan sektor industri per 1% berakibat pada meningkatnya Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.493%. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran per 1% berakibat meningkatnya Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.425%. Pertumbuhan sektor jasa per 1% berakibat pada meningkatnya Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.315%. Pertumbuhan sektor bank per 1% berakibat pada meningkatnya Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.583%.

Analisis Jangka Panjang

Nilai koefisien dari Y_{t-1} ternyata bertanda positif dan signifikan pada derajat kepercayaan (a) sebesar 0,05. Hal ini berarti model PAM dapat digunakan untuk mengestimasi atau menghitung koefisien jangka panjang dari Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) Kabupaten Klaten selama periode penelitian.

Persamaan jangka panjang untuk mengestimasi Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) Kabupaten Klaten sebagai berikut (Gujarati, 2000) :

$$Y_t = 9.600 + 1.052X_{1t} - 0.038X_{2t} + 0.560X_{3t} + 0.021X_{4t} + 0.397X_{5t} + 0.483X_{6t} + 0.431X_{7t} + 0.358X_{8t} + 0.663X_{9t} \dots\dots\dots(3)$$

Dari persamaan (3) tersebut dapat dilihat bahwa dalam jangka panjang sektor yang paling dominan berpengaruh terhadap DKF Kabupaten Klaten adalah Sektor pertanian, sektor Bank, dan sektor Industri. Pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1% akan meningkatkan Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 1.052%. Pertumbuhan sektor industri per 1% berakibat pada meningkatnya Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.560%. Pertumbuhan sektor bank per 1% berakibat pada meningkatnya Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.663%.

Dalam jangka panjang sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air tidak berpengaruh terhadap DKF Kabupaten Klaten. Hal ini disebabkan di daerah Kabupaten Klaten tidak terdapat sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi empiris variabel sektor ekonomi daerah yang mempengaruhi Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) di Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisa model PAM untuk Kabupaten Klaten diketahui dari sembilan sektor ekonomi daerah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap DKF Kabupaten Klaten baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah sektor pertanian, diikuti oleh sektor bank, dan sektor industri.
2. Dalam jangka pendek sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, air, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap DKF Kabupaten Klaten. Sementara untuk jangka panjang yang tidak signifikan adalah sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor listrik, gas,air.

b. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat memaksimalkan sektor pertanian dan agro industri, karena jika dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Klaten sangat cocok untuk pengembangan kedua sektor ini.
2. Pemerintah Kabupaten Klaten harus memberikan perhatian lebih kepada sektor industri yang berbasis sektor pertanian, selain itu pengembangan agrowisata berbasis *endowment factor* mutlak dikembangkan dengan memberikan kemudahan investasi di sektor ini. Dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat menambah Pendapatan Asli Daerahnya lewat retribusi dan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, Penerbit BPFE.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah*, Tahun 1998 s/d 2002, Semarang.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemda Tk. II* beberapa terbitan. Jakarta
- Devas, Nick, Brian, Biden, Anne Both, Kenneth Dovey, Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan, Masri Maris), Jakarta, Penerbit UI.
- Elia Radianto, 1997. "Otonomi Keuangan Dati II : Studi di Maluku", *Prisma*, No.3, Hal. : 39-50.
- Gujarati, Damodar, 1995. *Basic Econometric*, Third edition, Singapore, Mc Graw Hill Inc.
- Guritno, Mangkusubroto, 1993. *Ekonomi Publik*, Edisi 3, Yogyakarta, Penerbit BPFE UGM.
- Halim, Abdul, 1999. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit AMP YKPN.
- Ibnu Syamsi, 1994, *Dasar – Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit PT. Rineka Cipta,
- Keneeth Davey, 1986. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek - praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga* (terjemahan Amanullah dkk), Jakarta, Penerbit UI Press.
- Mardiasmo, 1999. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang No.22 Tahun 1999* tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang No.25 Tahun 1999* tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Todaro, Michael P, 1997. *Economic Development*. Sixth Edition. England, Longman.